KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembangunan IKN Dipastikan Terus Berlanjut
Tanggal : Minggu, 13 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pembangunan IKN Dipastikan Terus Berlanjut

DISAHKANNYA UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi dasar bahwa pembangunan IKN merupakan amanat yang harus dijalankan baik era pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun presiden selanjutnya.

Demikian pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong merespons adanya kekhawatiran pembangunan IKN hanya akan berjalan di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pembangunan dan pemindahan IKN pun dapat terus berlanjut.

"Dengan adanya UU, upaya memastikan keberlanjutannya. Sebab presiden, baik yang sekarang maupun yang akan datang harus menjalankan undang-undang ini," kata Wandy melalui siaran pers, kemarin.

UU IKN merupakan landasan hukum dalam melaksanakan proses pembangunan dan pemindahan IKN. Di dalamnya, kata dia, mengatur soal otoritas IKN, penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, hingga penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan.

Selain itu, mengenai skema pendanaan dan pengelolaan IKN, sudah diatur dalam UU tersebut. Pembangunan dan pemindahan IKN ditargetkan selesai pada 2045. "UU IKN menjadi landasan pemerintahan selanjutnya dalam meneruskan proses pembangunan dan pemindahan IKN di Kalimantan."

Adapun alasan pemerintah memulai pembangunan dan pemindahan IKN pada 2022, menurut Wandy, agar ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi. "Sebab momentumnya, ya sekarang ini, saat pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan penting. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca-2024," ujarnya.

Wandy mengatakan IKN menjadi strategi merealisasikan visi Indonesia 2045, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Pembangunan IKN juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan klaster pertama perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN Nusantara.

Ia menjelaskan hal itu sudah diputuskan dengan presiden dari hasil rapat dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa klaster pertama pemindahan ASN diharapkan selesai akhir 2023.

Klaster pertama yang akan pindah itu, yakni ASN dan anggota TNI-Polri sebanyak 60 ribu. Tjahjo mengatakan personel Polri yang dipilih memiliki kemampuan di bidang teknologi dan cepat beradaptasi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyarankan agar ASN yang dipindahkan itu sebaiknya memiliki kemampuan dalam informasi dan teknologi dan literasi digital. (Ind/J-2)